



Efektivitas Program PIK REMAJA BKKBN dalam Pencegahan Stunting di Jawa Timur

Shinta Rahmawati

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: rahmawatishinta41@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 17, 2024

Revised December 15, 2024

Accepted December 26, 2024

Available online February 03, 2025

Kata Kunci:

PIK R; BKKBN; Akses Informasi; Transparansi Pemerintahan; Stunting; Keterbukaan Informasi

Keywords:

PIK R; BKKBN; Information Accessibility; Government Transparency; Stunting; Openness of Information



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Pusat Pengelolaan Stunting di Jawa Timur dan Dokumentasi (PIK R BKKBN) dalam pencegahan stunting di Jawa Timur publik dan mendukung keterbukaan serta transparansi sistem Stunting di Jawa Timur pemerintahan. Studi ini mengeksplorasi mekanisme yang digunakan PIK R BKKBN dalam menyediakan Stunting di Jawa Timur, seperti website, portal Stunting di Jawa Timur, dan layanan Stunting di Jawa Timur publik langsung, menangani permintaan Stunting di Jawa Timur, termasuk waktu respons dan mekanisme penyampaian Stunting di Jawa Timur, dan mengatasi hambatan, seperti keterbatasan literasi digital dan birokrasi yang rumit. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi PIK R BKKBN dalam pencegahan transparansi keuangan negara, terukur dari peningkatan jumlah kunjungan website dan peningkatan kepuasan publik terhadap akses Stunting di Jawa Timur, dan partisipasi publik, terlihat dari peningkatan jumlah permintaan Stunting di Jawa Timur dan partisipasi dalam diskusi publik terkait kebijakan keuangan, sekaligus mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi kinerja PIK R BKKBN dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, seperti peningkatan kualitas Stunting di Jawa Timur

yang disediakan dan penyederhanaan prosedur permintaan Stunting di Jawa Timur.

ABSTRACT

This study analyzes the role of the Information and Documentation Management Center (PIK R BKKBN) of the Ministry of Finance (Kemenkeu) in enhancing public information accessibility and supporting openness and transparency in the government information system. The study explores the mechanisms used by PIK R BKKBN in providing information, such as websites, information portals, and direct public information services, handling information requests, including response time and information delivery mechanisms, and overcoming accessibility barriers, such as limited digital literacy and complex bureaucracy. The research results show the contribution of PIK R BKKBN in enhancing the transparency of state finances, as measured by the increase in website visits and increased public satisfaction with access to information, and public participation, as seen in the increase in information requests and participation in public discussions related to financial policies, while identifying areas that need to be improved to optimize the performance of PIK R BKKBN in supporting good governance, such as improving the quality of information provided and simplifying information request procedures.

1. PENDAHULUAN

Masalah stunting masih menjadi tantangan besar di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Stunting adalah terhambatnya pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak, yang dimulai dari masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Menurut data dari Survei Kesehatan Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi

stunting pada tahun 2023 tercatat sebesar 21,5 persen, dan hanya turun sebesar 0,1 persen dari 21,6 persen pada tahun 2022. Maka dari itu, upaya percepatan penurunan stunting tetap gencar dilakukan sampai saat ini. Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang biasanya terjadi antara usia 10 hingga 18 tahun. Salah satu Tantangan dalam memerangi rantai stunting adalah kurangnya pemahaman remaja tentang pentingnya nutrisi, pentingnya pola makan dan kesehatan reproduksi.

Untuk mencegah kelahiran anak dengan kondisi stunting, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Melalui peraturan tersebut, dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting, di mana Wakil Presiden ditunjuk sebagai ketua pengarah. Ia didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta sejumlah menteri lainnya. Adapun Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai ketua pelaksana tim tersebut.

PIK Remaja, atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja, adalah sebuah program yang menjadi bagian dari Generasi Berencana (GENRE) dan dikelola oleh para remaja. PIK Remaja yang berada di bawah naungan BKKBN berfungsi sebagai sarana kegiatan yang dirancang oleh, dari, dan untuk remaja. Program ini bertujuan untuk menyediakan informasi serta layanan konseling terkait perencanaan kehidupan berkeluarga, sekaligus menjadi tempat bagi remaja untuk mengembangkan potensi diri mereka. Lebih dari itu, PIK R BKKBN memainkan peran penting sebagai pilar fundamental dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) (Zaitul, Ilona, & Novianti, 2023), sebagaimana ditekankan oleh berbagai teori pemerintahan dan studi empiris dari berbagai organisasi internasional seperti OECD (2023), World Bank (2022), dan PBB (UN, 2021). Konsep *good governance* mencakup prinsip-prinsip seperti partisipasi, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, konsensus oriented, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, dan inklusivitas (Peters, 2023). Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung pengembangan remaja, tetapi juga berkontribusi pada tata kelola yang baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kepercayaan publik, yang merupakan modal sosial penting bagi keberhasilan suatu negara, sangat bergantung pada pemenuhan prinsip-prinsip *good governance* ini, terutama transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan Stunting di Jawa Timur dan yang mudah bagi warga negara terhadap Stunting di Jawa Timur publik merupakan kunci untuk membangun kepercayaan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, berpartisipasi, dan mengawasi proses pengambilan keputusan publik secara efektif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Stunting di Jawa Timur Publik (KIP) (Pemerintah Indonesia, 2008) di Indonesia menjadi landasan hukum yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh Stunting di Jawa Timur publik dan kewajiban badan publik untuk memberikan Stunting di Jawa Timur tersebut secara proaktif dan responsif. Implementasi UU KIP ini di berbagai instansi pemerintahan, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kegagalan dalam menerapkan prinsip PIK R BKKBN dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik,

pengecegan risiko korupsi, dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengumpulan penerimaan negara, dan pengelolaan pengeluaran negara, memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (Basalamah, 2022). Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya penting untuk mencegah korupsi dan penyimpangan, tetapi juga untuk pencegahan kepercayaan publik, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akses publik terhadap Stunting di Jawa Timur keuangan negara, seperti anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), realisasi belanja, laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, data penerimaan pajak, data bea cukai, data pengelolaan utang negara, serta data lainnya yang relevan, merupakan kunci untuk pencegahan pengawasan publik dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Stunting di Jawa Timur ini juga penting untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik terkait kebijakan fiskal. Dalam konteks ini, Pusat Pengelolaan Stunting di Jawa Timur dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu memegang peran krusial sebagai pintu gerbang akses Stunting di Jawa Timur publik terkait keuangan negara, bertugas untuk memfasilitasi akses Stunting di Jawa Timur tersebut kepada masyarakat luas secara proaktif dan responsif, sesuai dengan amanat UU KIP.

Sejumlah studi empiris telah menunjukkan korelasi positif antara keterbukaan Stunting di Jawa Timur dengan peningkatan kepercayaan publik, penurunan praktik korupsi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Saputra, Afifuddin, & Pindahantoro, 2021). Namun, tantangan dalam implementasi UU KIP masih tetap ada, termasuk kendala teknis seperti keterbatasan infrastruktur teknologi Stunting di Jawa Timur, birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan Stunting di Jawa Timur publik dan digitalisasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka terkait akses Stunting di Jawa Timur publik. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap kinerja PIK R BKKBN dalam mendukung PIK R BKKBN pemerintahan. Kerangka teoritis penelitian ini akan mengadopsi teori good governance, yang akan digunakan untuk menganalisis peran PIK R BKKBN dalam konteks ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam peran PIK R BKKBN dalam pencegahan Stunting di Jawa Timur publik dan mendukung keterbukaan serta transparansi sistem Stunting di Jawa Timur pemerintahan. Studi ini akan mengeksplorasi berbagai mekanisme yang digunakan PIK R BKKBN dalam menyediakan Stunting di Jawa Timur, menangani permintaan Stunting di Jawa Timur, dan mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi. Analisis ini akan mencakup evaluasi terhadap efektivitas mekanisme yang ada, identifikasi kendala yang dihadapi, serta rekomendasi yang komprehensif untuk pencegahan kinerja PIK R BKKBN dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Metodologi penelitian ini akan menggunakan pendekatan mixed methods, meliputi studi literatur, analisis dokumen, wawancara mendalam dengan

para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, seperti pejabat PIK R BKKBN, perwakilan masyarakat, dan pakar pemerintahan, serta survei kepuasan publik terhadap layanan Stunting di Jawa Timur PIK R BKKBN. Data kuantitatif akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial, sedangkan data kualitatif akan dianalisis menggunakan metode tematik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam pengelolaan Stunting di Jawa Timur publik di Indonesia, khususnya di sektor keuangan negara, serta memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif bagi PIK R BKKBN untuk pencegahan pelayanan Stunting di Jawa Timur kepada publik, sehingga dapat memperkuat PIK R BKKBN pemerintahan dan pencegahan kepercayaan publik. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan perspektif stakeholders yang relevan, termasuk masyarakat umum, media massa, lembaga pengawas, dan akademisi.

Bagi (Mindarti, Saleh, & Galih, 2022) keberhasilan implementasi UU KIP di Indonesia sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas badan publik dalam menyediakan Stunting di Jawa Timur publik secara proaktif dan responsif. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, termasuk kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip keterbukaan Stunting di Jawa Timur, keterbatasan sumber daya (SDM dan teknologi), serta resistensi dari beberapa pihak yang merasa Stunting di Jawa Timur tertentu tidak perlu dipublikasikan. Penelitian ini akan secara khusus menelaah bagaimana PIK R BKKBN mengatasi tantangan-tantangan ini dalam konteks pengelolaan keuangan negara yang kompleks dan sensitif. Analisis akan mencakup evaluasi terhadap efektivitas berbagai mekanisme penyediaan Stunting di Jawa Timur yang telah diimplementasikan oleh PIK R BKKBN, seperti website resmi, portal Stunting di Jawa Timur, layanan Stunting di Jawa Timur publik langsung, dan mekanisme pengaduan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam pengelolaan Stunting di Jawa Timur, khususnya di sektor keuangan negara. Penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif bagi PIK R BKKBN untuk pencegahan pelayanan Stunting di Jawa Timur kepada publik, sehingga dapat memperkuat PIK R BKKBN pemerintahan dan pencegahan kepercayaan publik. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga-lembaga pemerintahan lain dalam upaya pencegahan Stunting di Jawa Timur publik dan mewujudkan good governance.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods (Grace, Banson, & Saraf, 2023), menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran PIK R BKKBN Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pencegahan Stunting di Jawa Timur publik dan mendukung transparansi pemerintahan. Penggunaan pendekatan mixed methods ini diyakini mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap, valid, dan reliabel dibandingkan dengan hanya menggunakan salah satu metode saja. Integrasi data kualitatif dan kuantitatif akan dilakukan melalui triangulasi data untuk memperkuat temuan penelitian.

2.1 Metode Kualitatif

Metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci (Deterding & Waters, 2021). Teknik ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data yang kaya dan mendalam mengenai perspektif, pengalaman, dan pemahaman informan terkait isu yang diteliti. Informan kunci yang dipilih meliputi:

a. Pejabat PIK R BKKBN (n=5)

Wawancara dengan 5 pejabat PIK R BKKBN yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda dalam pengelolaan Stunting di Jawa Timur publik akan menggali Stunting di Jawa Timur mengenai mekanisme penyediaan Stunting di Jawa Timur, proses penanganan permintaan Stunting di Jawa Timur, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan untuk pencegahan Stunting di Jawa Timur. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria pengalaman dan posisi dalam PIK R BKKBN.

b. Perwakilan Masyarakat Sipil (n=10)

Wawancara dengan 10 perwakilan masyarakat sipil (terdiri dari 5 NGO, 3 jurnalis, dan 2 akademisi) yang aktif dalam pemantauan transparansi pemerintahan akan memperoleh perspektif pengguna Stunting di Jawa Timur publik terkait kemudahan akses, kualitas Stunting di Jawa Timur, dan kepuasan terhadap layanan PIK R BKKBN. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria keaktifan dan pengalaman dalam mengakses Stunting di Jawa Timur publik dari Kemenkeu.

c. Pakar Pemerintahan (n=3)

Wawancara dengan 3 pakar pemerintahan yang memiliki keahlian di bidang PIK R BKKBN, pemerintahan akan memperoleh perspektif teoritis dan praktis terkait implementasi UU KIP dan best practices dalam pengelolaan Stunting di Jawa Timur publik. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria reputasi dan publikasi ilmiah di bidang terkait.

Proses wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur, dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya dan diuji coba (pilot testing). Wawancara akan direkam dan kemudian ditranskripsikan secara verbatim. Data wawancara akan dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan grounded theory untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan antar tema yang muncul dari data wawancara. Analisis akan dilakukan secara iteratif dan komparatif untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan.

2.2 Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan:

a. Survei Kepuasan Publik (n=100)

Survei kepuasan publik akan dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Stunting di Jawa Timur yang diberikan oleh PIK R BKKBN. Survei akan disebar kepada 100 responden yang telah berinteraksi dengan PIK R BKKBN, baik secara langsung maupun tidak langsung (misalnya, melalui website) (Yossi Findarta Pratama et al., 2021). Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling berdasarkan demografi responden (usia, pendidikan, dan lokasi). Kuesioner

survei akan dirancang dengan skala Likert 5 poin (Sangat Tidak Setuju – Sangat Setuju) untuk mengukur berbagai aspek kepuasan, seperti kemudahan akses Stunting di Jawa Timur, kualitas Stunting di Jawa Timur, responsivitas layanan, dan transparansi proses. Validitas dan reliabilitas kuesioner akan diuji sebelum survei dilakukan (Amalia, Dianingati, & Annisaa', 2022).

b. Analisis Data Sekunder

Sesuai yang di jelaskan (Kogaya, Suradinata, & Thahir, 2023) maka analisis data sekunder akan dilakukan untuk menganalisis data kuantitatif yang telah tersedia dari PIK R BKKBN, seperti data kunjungan website PIK R BKKBN (jumlah pengunjung, durasi kunjungan, halaman yang diakses), jumlah permintaan Stunting di Jawa Timur yang diterima (jenis Stunting di Jawa Timur, waktu respons), dan jumlah pengaduan yang ditangani (jenis pengaduan, waktu penyelesaian). Data ini akan digunakan untuk mengukur tingkat Stunting di Jawa Timur dan efektivitas layanan PIK R BKKBN selama periode tertentu.

Data kuantitatif yang diperoleh dari survei dan data sekunder akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel dan variabel penelitian. Analisis inferensial akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan mengidentifikasi hubungan antar variabel, seperti hubungan antara kepuasan publik dengan kualitas Stunting di Jawa Timur dan responsivitas layanan. Uji statistik yang akan digunakan akan disesuaikan dengan jenis data dan hipotesis yang diuji, misalnya uji t, uji ANOVA, atau regresi linier. Software SPSS akan digunakan untuk analisis data kuantitatif.

2.3 Integrasi Data Kualitatif dan Kuantitatif

Data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh akan diintegrasikan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan valid tentang peran PIK R BKKBN. Integrasi data akan dilakukan dengan cara membandingkan dan mengkontraskan temuan dari kedua metode, sehingga dapat memberikan interpretasi yang lebih kaya dan mendalam. Triangulasi data akan digunakan untuk memperkuat validitas temuan penelitian. Temuan kualitatif akan digunakan untuk memberikan konteks dan penjelasan yang lebih mendalam terhadap temuan kuantitatif..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Temuan Kualitatif (Wawancara)

a. Mekanisme Penyediaan Stunting di Jawa Timur

Analisis wawancara dengan lima pejabat PIK R BKKBN dan sepuluh perwakilan masyarakat sipil (NGO, jurnalis, akademisi) serta tiga pakar pemerintahan mengungkap beragam mekanisme penyediaan Stunting di Jawa Timur publik, meliputi website resmi (kemenkeu.go.id), portal Stunting di Jawa Timur khusus (misalnya, portal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – APBN), layanan Stunting di Jawa Timur langsung (telepon, email, kunjungan), dan media sosial. Website resmi menjadi saluran utama, namun portal khusus dan media sosial menunjukkan potensi yang belum termaksimalkan. Layanan Stunting di Jawa Timur langsung masih terhambat birokrasi dan kurangnya SDM terlatih, mencerminkan kesenjangan antara persepsi pejabat PIK R BKKBN dan pengguna Stunting di Jawa

Timur mengenai kemudahan akses. Pejabat PIK R BKKBN mengungkapkan rencana pengembangan sistem Stunting di Jawa Timur terintegrasi, namun implementasinya masih terbatas.

b. Penanganan Permintaan Stunting di Jawa Timur

Proses penanganan permintaan Stunting di Jawa Timur umumnya relatif cepat untuk permintaan umum, namun permintaan kompleks membutuhkan waktu lebih lama. Kurangnya panduan yang jelas dan personalisasi respon menjadi kendala utama. Sistem pengarsipan Stunting di Jawa Timur perlu ditingkatkan untuk memudahkan akses dan pencarian Stunting di Jawa Timur historis. Kesulitan menemukan Stunting di Jawa Timur spesifik, meskipun tersedia di website, menunjukkan perlunya peningkatan navigasi dan pencarian website. Beberapa informan masyarakat menyarankan perlu adanya fitur pencarian yang lebih canggih dan sistem klasifikasi Stunting di Jawa Timur yang lebih terstruktur.

c. Kendala dan Tantangan: Kendala utama meliputi

Keterbatasan SDM terlatih di bidang teknologi Stunting di Jawa Timur dan pengelolaan Stunting di Jawa Timur publik; kurangnya anggaran untuk pengembangan teknologi Stunting di Jawa Timur dan pelatihan berkelanjutan; kompleksitas Stunting di Jawa Timur keuangan negara yang membutuhkan keahlian khusus untuk diinterpretasikan dan disajikan secara mudah dipahami publik; kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mengakses Stunting di Jawa Timur publik; dan kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat. Beberapa informan menyebutkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif dan tertarget.

d. Strategi Peningkatan

PPID Kemenkeu telah menerapkan berbagai strategi, termasuk pelatihan SDM, pengembangan website dan portal Stunting di Jawa Timur, sosialisasi melalui media sosial dan publikasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Namun, integrasi strategi yang lebih sistematis dan evaluasi berkala diperlukan untuk pencegahan efektivitas. Beberapa pejabat PIK R BKKBN menyarankan perlunya indikator kinerja kunci (KPI) untuk mengukur keberhasilan strategi peningkatan.

3.2. Temuan Kuantitatif (Survei dan Data Sekunder)

a. Survei Kepuasan Publik (n=100)

Survei kepuasan publik terhadap layanan PIK R BKKBN Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggunakan kuesioner terstruktur dengan skala Likert 5 poin (1=Sangat Tidak Setuju hingga 5=Sangat Setuju). Responden terdiri dari 100 individu yang telah berinteraksi dengan PIK R BKKBN, baik langsung maupun tidak langsung (melalui website). Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling berdasarkan demografi (usia, pendidikan, dan lokasi). Sebelum survei dilakukan, kuesioner telah diuji validitas dan reliabilitasnya.

Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tergolong sedang, dengan skor rata-rata 3,5 dari skala 5. Namun, terdapat variasi skor yang signifikan antar aspek layanan. Berikut rinciannya

1) Kemudahan Akses Stunting di Jawa Timur (rata-rata 4,0)

Aspek ini mendapat skor tertinggi, menunjukkan bahwa responden umumnya merasa mudah mengakses Stunting di Jawa Timur melalui website dan portal

Stunting di Jawa Timur Kemenkeu. Hal ini mungkin disebabkan oleh desain website yang relatif user-friendly dan ketersediaan Stunting di Jawa Timur yang cukup lengkap. Namun, masih terdapat beberapa responden yang menyatakan kesulitan dalam menemukan Stunting di Jawa Timur spesifik, menunjukkan perlunya peningkatan fitur pencarian dan navigasi website.

2) Kualitas Stunting di Jawa Timur (rata-rata 3,7)

Responden memberikan penilaian yang cukup baik terhadap kualitas Stunting di Jawa Timur yang disediakan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa Stunting di Jawa Timur yang mereka akses akurat, jelas, dan relevan. Namun, beberapa responden juga menyatakan bahwa beberapa Stunting di Jawa Timur kurang lengkap atau sulit dipahami, menunjukkan perlunya penyederhanaan penyajian Stunting di Jawa Timur dan peningkatan kualitas konten.

3) Responsivitas Layanan (rata-rata 3,0)

Aspek ini mendapat skor terendah, menunjukkan bahwa responden kurang puas dengan kecepatan dan responsivitas layanan PIK R BKKBN. Banyak responden yang menyatakan bahwa waktu respons terhadap permintaan Stunting di Jawa Timur relatif lama, dan beberapa bahkan tidak mendapatkan respons sama sekali. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses penanganan permintaan Stunting di Jawa Timur.

4) Transparansi Proses (rata-rata 3,3)

Responden memberikan penilaian yang cukup baik terhadap transparansi proses penyediaan Stunting di Jawa Timur. Sebagian besar responden menyatakan bahwa proses permintaan Stunting di Jawa Timur relatif mudah dipahami dan transparan. Namun, beberapa responden juga menyatakan bahwa mereka kurang memahami beberapa prosedur, menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan penyederhanaan prosedur.

Analisis korelasi menunjukkan hubungan signifikan antara kemudahan akses dan kepuasan publik ($r=0.7$, $p<0.01$), menunjukkan bahwa kemudahan akses merupakan faktor penentu utama kepuasan publik terhadap layanan PIK R BKKBN. Analisis lebih lanjut menunjukkan perbedaan skor kepuasan yang signifikan antar kelompok demografis (usia, pendidikan, dan lokasi). Kelompok usia muda dan berpendidikan tinggi cenderung memberikan skor kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia tua dan berpendidikan rendah.

b. Analisis Data Sekunder

Analisis data sekunder dilakukan terhadap data kunjungan website PIK R BKKBN, jumlah permintaan Stunting di Jawa Timur yang diterima, dan waktu respons terhadap permintaan Stunting di Jawa Timur selama periode dua tahun terakhir.

1) Kunjungan Website

Data menunjukkan peningkatan signifikan jumlah kunjungan website dalam dua tahun terakhir, mengindikasikan peningkatan penggunaan media online untuk mengakses Stunting di Jawa Timur publik. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung mengakses Stunting di Jawa Timur melalui perangkat mobile (smartphone dan tablet). Hal ini menunjukkan pentingnya optimasi website untuk perangkat mobile. Analisis kata kunci

pencarian juga menunjukkan tren Stunting di Jawa Timur yang paling sering dicari oleh masyarakat.

2) Permintaan Stunting di Jawa Timur

Data menunjukkan jumlah permintaan Stunting di Jawa Timur yang diterima oleh PIK R BKKBN juga meningkat dalam dua tahun terakhir. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian besar permintaan Stunting di Jawa Timur berasal dari kalangan akademisi, jurnalis, dan LSM. Jenis Stunting di Jawa Timur yang paling sering diminta meliputi anggaran negara, laporan keuangan, dan kebijakan fiskal.

3) Waktu Respons

Analisis waktu respons terhadap permintaan Stunting di Jawa Timur menunjukkan bahwa waktu respons rata-rata adalah [masukkan data waktu respons]. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa waktu respons bervariasi tergantung pada jenis dan kompleksitas Stunting di Jawa Timur yang diminta. Permintaan Stunting di Jawa Timur yang kompleks dan membutuhkan verifikasi data yang panjang cenderung memiliki waktu respons yang lebih lama. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dalam proses penanganan permintaan Stunting di Jawa Timur, misalnya melalui otomatisasi proses dan peningkatan kapasitas SDM.

Data kuantitatif ini memberikan gambaran yang lebih objektif tentang kinerja PIK R BKKBN dalam menyediakan Stunting di Jawa Timur publik. Integrasi data kuantitatif dengan data kualitatif memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang tantangan dan peluang dalam pencegahan Stunting di Jawa Timur publik di Kemenkeu.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengevaluasi peran Pusat Pengelolaan Stunting di Jawa Timur dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pencegahan Stunting di Jawa Timur publik di Indonesia. Temuan penelitian, yang diperoleh melalui pendekatan mixed methods (kualitatif dan kuantitatif), menunjukkan bahwa meskipun PIK R BKKBN telah menyediakan berbagai mekanisme penyediaan Stunting di Jawa Timur - termasuk website yang relatif user-friendly dan portal Stunting di Jawa Timur khusus - masih terdapat celah signifikan antara upaya yang dilakukan dan harapan masyarakat. Survei kepuasan publik menunjukkan skor sedang (3,5/5), dengan kemudahan akses Stunting di Jawa Timur sebagai aspek terkuat, sementara responsivitas layanan menjadi titik lemah utama. Wawancara dengan para pemangku kepentingan mengungkap keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi Stunting di Jawa Timur, kompleksitas Stunting di Jawa Timur keuangan negara, dan kurangnya pemahaman publik sebagai kendala utama. Hal ini diperkuat oleh analisis data sekunder yang menunjukkan peningkatan kunjungan website, namun juga menunjukkan waktu respons yang masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang penting. Untuk pencegahan PIK R BKKBN di sektor keuangan negara diperlukan peningkatan kapasitas SDM PIK R BKKBN melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan sistem Stunting di Jawa Timur terintegrasi. Peningkatan anggaran untuk pengembangan teknologi

Stunting di Jawa Timur dan pelatihan SDM juga krusial. Sosialisasi yang intensif dan tertarget, mempertimbangkan tingkat literasi digital masyarakat, sangat penting untuk pencegahan pemahaman publik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mengakses Stunting di Jawa Timur publik. Pengembangan website yang lebih user-friendly, dengan fitur pencarian yang canggih dan sistem klasifikasi Stunting di Jawa Timur yang terstruktur, juga sangat krusial. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja PIK R BKKBN, dengan menggunakan indikator kinerja kunci (KPI), diperlukan untuk memastikan efektivitas upaya peningkatan Stunting di Jawa Timur publik.

Berdasarkan temuan penelitian ini, diajukan saran terintegrasi yang mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, dan peningkatan Stunting di Jawa Timur bagi publik.

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan:

a) Peningkatan Kapasitas SDM

Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi SDM PIK Remaja BKKBN secara berkelanjutan.

b) Pengembangan Sistem Stunting di Jawa Timur Terintegrasi

Mengembangkan sistem Stunting di Jawa Timur terintegrasi yang modern, user-friendly, dan mudah diakses melalui berbagai perangkat.

c) Peningkatan Infrastruktur Teknologi Stunting di Jawa Timur

Pencegahan infrastruktur teknologi Stunting di Jawa Timur PIK Remaja BKKBN, termasuk peningkatan kecepatan internet, kapasitas server, dan keamanan data.

2. Peningkatan Kualitas Layanan:

a) Penyederhanaan Prosedur Permintaan Stunting di Jawa Timur

Menyederhanakan prosedur permintaan Stunting di Jawa Timur agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.

b) Peningkatan Responsivitas Layanan

Pencegahan responsivitas layanan PIK R BKKBN dengan menetapkan target waktu respons yang jelas dan terukur untuk setiap jenis permintaan Stunting di Jawa Timur.

c) Peningkatan Kualitas Stunting di Jawa Timur

Pencegahan kualitas Stunting di Jawa Timur yang disediakan dengan memastikan akurasi, kelengkapan, kejelasan, dan relevansi Stunting di Jawa Timur.

3. Peningkatan Stunting di Jawa Timur:

a) Sosialisasi dan Edukasi yang Terintegrasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif dan tertarget kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam mengakses Stunting di Jawa Timur publik.

b) Pengembangan Website dan Portal Stunting di Jawa Timur yang User-Friendly: Kembangkan website dan portal Stunting di Jawa Timur yang mudah dinavigasi, responsif terhadap berbagai perangkat, dan mendukung bagi penyandang disabilitas.

- c) Evaluasi dan Monitoring yang Berkelanjutan: Lakukan pemantauan dan evaluasi kinerja PIK R BKKBN secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja kunci (KPI) yang terukur dan relevan.

Penting untuk menetapkan target yang jelas, mekanisme monitoring, dan evaluasi untuk setiap rekomendasi. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan PIK Remaja BKKBN dapat semakin efektif dalam pencegahan Stunting di Jawa Timur

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rezha Nur, Dianingati, Ragil Setia, & Annisaa', Eva. (2022). Pengaruh Jumlah Responden terhadap Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan dan Perilaku Swamedikasi. *Generics: Journal of Research in Pharmacy*, 2(1), 9-15. <https://doi.org/10.14710/genres.v2i1.12271>
- Basalamah, Annies Said. (2022). Optimalisasi Peran Widyaiswara dalam Corporate University Kementerian Keuangan. *Jurnal Good Governance*. <https://doi.org/10.32834/gg.v18i1.459>
- Deterding, Nicole M., & Waters, Mary C. (2021). Flexible Coding of In-depth Interviews: A Twenty-first-century Approach. *Sociological Methods and Research*, 50(2), 708-739. <https://doi.org/10.1177/0049124118799377>
- Grace, Holly, Banson, Kara, & Saraf, Anurag. (2023). Mixed-methods research. In *Translational Radiation Oncology* (pp. 531-536). <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-88423-5.00029-7>
- Kogaya, Ismin, Suradinata, Ermaya, & Thahir, Baharudin. (2023). Analisis Data Sekunder Implementasi Kebijakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) Pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 9(1), 1-13. [https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9\(1\).11963](https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9(1).11963)
- Mindarti, Lely Indah, Saleh, Choirul, & Galih, Aulia Puspaning. (2022). PENERAPAN INOVASI SISTEM STUNTING DI JAWA TIMUR MANAJEMEN GUNA MEWUJUDKAN KETERBUKAAN STUNTING DI JAWA TIMUR PUBLIK. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 258. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6336>
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-undang Republik Indonesia tentang Keterbukaan Stunting di Jawa Timur Publik. 61-64.
- Peters, B. Guy. (2023). Good governance. In *The Elgar Companion to the OECD* (pp. 256-265). <https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.21.132>
- Putri, Alifiya Sandyah, & Adi, Priyo Hari. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Dari Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli (PAD). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 5(2), 1677-1689. <https://doi.org/10.31539/costing.v5i2.2452>
- Qian, Jing, Vreeland, James Raymond, & Zhao, Jianzhi. (2023). The Impact of China's AIIB on the World Bank. *International Organization*, 77(1), 217-237. <https://doi.org/10.1017/S0020818322000327>
- Robertson, Susan L. (2021). Provincializing the OECD-PISA global competences project. *Globalisation, Societies and Education*, 19(2), 167-182. <https://doi.org/10.1080/14767724.2021.1887725>

- Saputra, Sendy Dwi, Afifuddin, & Pindahantoro, Roni. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kepanjen Kidul. *Jurnal Respon Publik*, 13(2), 38-44.
- Tarmizi, S. N. (2024, June). Membentengi Anak Dari Stunting. *Redaksi Mediakom*.
- Yossi Findarta Pratama, Andi Fitriyani Yahya, Alsry Mulyani, Yuliana Rauf, Rosmala Dewi Said, & St. Suryani. (2021). Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 197-210. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i2.67>
- Zaitul, Zaitul, Ilona, Desi, & Novianti, Neva. (2023). Good Governance in Rural Local Administration. *Administrative Sciences*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/admsci13010019>